

BAB II

DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN QRIS OLEH BANK INDONESIA DAN KARAKTERISTIK RESPONDEN

2.1 Sejarah Singkat Bank Indonesia dan QRIS

Bank Indonesia (BI) didirikan pada 1 Juli 1953, menggantikan De Javasche Bank, yang sebelumnya berfungsi sebagai bank sirkulasi pada masa kolonial Belanda. Sejak awal pendiriannya, BI diberikan peran penting dalam menjaga stabilitas moneter dan sistem pembayaran nasional, sejalan dengan kebutuhan ekonomi Indonesia pasca-kemerdekaan.

Seiring perkembangan ekonomi dan tantangan global, peran BI mengalami perubahan signifikan dengan diberlakukannya Undang-Undang No. 23 Tahun 1999. Regulasi ini menjadikan Bank Indonesia sebagai lembaga independen, lepas dari campur tangan pemerintah dalam pengambilan kebijakan, serta menetapkan tiga tugas utama sebagai berikut:

1. Menjaga Stabilitas Nilai Rupiah

Mengelola kebijakan moneter, termasuk pengendalian inflasi, suku bunga, dan intervensi pasar valuta asing jika diperlukan

2. Mengatur dan Mengawasi Sistem Perbankan (Hingga 2011)

Sebelum kewenangan ini dialihkan ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada 2011, BI berperan dalam mengawasi operasional bank dan menjaga stabilitas sector perbankan.

3. Menjaga Kelancaran Sistem Pembayaran

BI mengembangkan berbagai inovasi dalam sistem pembayaran, termasuk digitalisasi transaksi keuangan. Salah satu terobosan utamanya adalah QRIS (Quick Response

Code Indonesian Standard), yang mempermudah pembayaran digital secara universal di Indonesia.

Dalam era digital, Bank Indonesia terus memperkuat perannya dalam mendukung sistem keuangan yang inklusif dan efisien. Dengan berbagai kebijakan yang adaptif, BI berupaya memastikan sistem pembayaran yang aman, cepat, dan terintegrasi, guna mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

Sebelum hadirnya Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS), sistem pembayaran berbasis QR Code di Indonesia tidak memiliki standar yang seragam. Akibatnya, muncul beberapa tantangan utama:

- Fragmentasi dalam sistem pembayaran digital, di mana setiap penyedia layanan e-wallet atau perbankan memiliki QR Code sendiri yang tidak bisa digunakan secara universal.
- Keterbatasan bagi pengguna, karena mereka harus memiliki banyak aplikasi e-wallet atau rekening bank yang sesuai dengan QR Code yang digunakan oleh merchant.
- Efisiensi transaksi yang rendah, baik bagi konsumen maupun merchant, karena tidak adanya sistem yang dapat mengakomodasi berbagai penyedia layanan dalam satu mekanisme pembayaran yang terintegrasi.

Melihat tantangan tersebut, Bank Indonesia (BI) memandang perlu adanya standarisasi QR Code untuk menciptakan ekosistem pembayaran digital yang lebih efisien dan inklusif. Langkah ini bertujuan untuk:

- Meningkatkan interoperabilitas antar penyedia jasa sistem pembayaran (PJSP), baik dari sektor perbankan maupun fintech.

- Menyederhanakan transaksi digital, sehingga masyarakat cukup memiliki satu aplikasi e-wallet atau mobile banking yang kompatibel dengan seluruh merchant berlogo QRIS.
- Mendorong inklusi keuangan dengan memperluas adopsi pembayaran digital hingga ke sektor UMKM dan pedagang kecil.

Untuk mewujudkan sistem pembayaran yang lebih terintegrasi, Bank Indonesia bekerja sama dengan Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI) dalam pengembangan QRIS. Standarisasi ini memungkinkan satu QR Code dapat digunakan oleh berbagai aplikasi pembayaran, baik dari bank maupun fintech.

QRIS resmi diluncurkan pada 17 Agustus 2019, bertepatan dengan peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia, sebagai bagian dari digitalisasi ekonomi nasional. Kehadiran QRIS tidak hanya meningkatkan efisiensi sistem pembayaran tetapi juga mendukung transformasi digital di sektor keuangan, menjadikannya solusi transaksi yang lebih mudah, cepat, aman, dan universal.

2.2 Visi dan Misi Bank Indonesia

2.2.1 Visi Bank Indonesia

Visi Bank Indonesia adalah “Menjadi bank sentral digital terdepan yang berkontribusi nyata terhadap perekonomian nasional dan terbaik di antara negara emerging markets untuk Indonesia Maju.” (Bank Indonesia, n.d).

Dalam visi ini, Bank Indonesia menekankan perannya dalam menghadirkan inovasi berbasis digital untuk mendukung stabilitas moneter, sistem keuangan, serta sistem pembayaran yang efisien dan inklusif. Salah satu langkah nyata dalam mendukung transformasi digital ini adalah pengembangan Quick Response Code

Indonesian Standard (QRIS), yang memungkinkan transaksi nontunai menjadi lebih mudah, cepat, dan aman bagi masyarakat Indonesia.

2.2.2 Misi Bank Indonesia

Untuk mewujudkan visinya, Bank Indonesia memiliki beberapa misi strategis, yang mencerminkan peran utamanya dalam menjaga stabilitas ekonomi dan mendukung pertumbuhan yang berkelanjutan. Misi tersebut meliputi:

1. Mencapai stabilitas nilai rupiah melalui efektivitas penetapan dan pelaksanaan kebijakan moneter serta bauran kebijakan yang berkelanjutan, konsisten, dan transparan.
2. Memelihara stabilitas sistem pembayaran melalui kebijakan, pengaturan, perizinan, penyelenggaraan, serta pengawasan sistem pembayaran dan pengelolaan uang rupiah, termasuk percepatan ekonomi dan keuangan digital.
3. Menjaga stabilitas sistem keuangan dengan kebijakan makroprudensial yang mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
4. Mendukung stabilitas makroekonomi dan pertumbuhan ekonomi melalui sinergi bauran kebijakan dengan pemerintah pusat dan daerah, otoritas/lembaga terkait, mitra strategis, serta kerja sama internasional.
5. Meningkatkan pendalaman pasar keuangan, termasuk pasar uang dan pasar valuta asing, guna memperkuat efektivitas kebijakan Bank Indonesia dan mendukung pembiayaan ekonomi nasional.
6. Mendorong inklusi ekonomi-keuangan dan keuangan berkelanjutan, baik secara konvensional maupun berbasis prinsip syariah, serta meningkatkan perlindungan konsumen melalui kebijakan dan program kerja.

7. Mewujudkan bank sentral berbasis digital dalam kebijakan dan kelembagaan, dengan tata kelola yang profesional untuk mendukung efektivitas dan kredibilitas organisasi.

Salah satu implementasi nyata dari misi Bank Indonesia dalam sistem pembayaran adalah penerapan QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard) sebagai standar pembayaran nasional berbasis QR Code. Kehadiran QRIS memungkinkan sistem pembayaran yang lebih terintegrasi, aman, efisien, dan inklusif, sekaligus mengurangi ketergantungan pada transaksi tunai. Dengan demikian, BI berperan aktif dalam mempercepat transformasi ekonomi digital serta meningkatkan akses keuangan bagi seluruh lapisan masyarakat, sejalan dengan misinya untuk menjaga stabilitas sistem pembayaran dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

2.2.3 Logo Bank Indonesia

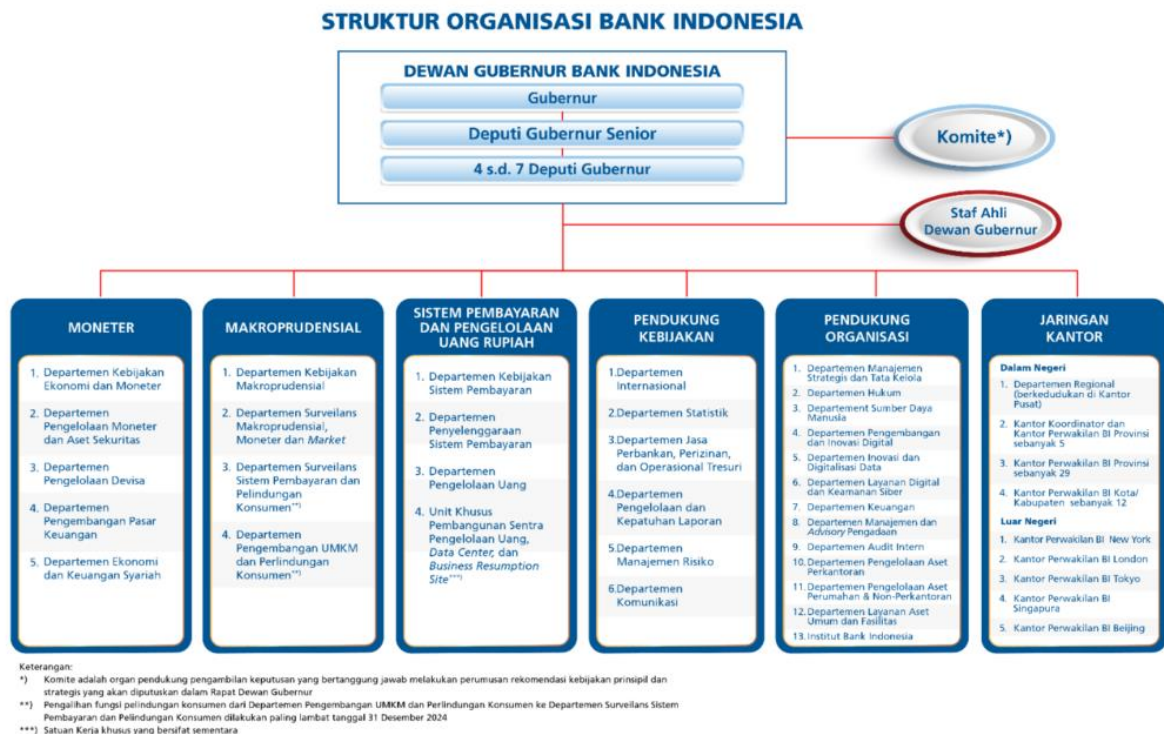


Gambar 2. 1 Logo Bank Indonesia

Logo Bank Indonesia berbentuk huruf "BI" yang terjalin dalam lingkaran berwarna biru dan putih. Logo ini melambangkan integritas, stabilitas, dan kepercayaan yang menjadi pilar utama Bank Indonesia dalam menjalankan tugasnya sebagai bank sentral.

Warna biru mencerminkan profesionalisme dan kredibilitas, sedangkan bentuk lingkaran melambangkan cakupan kerja Bank Indonesia yang luas dan menyeluruh dalam menjaga kestabilan ekonomi nasional.

2.3 Struktur Organisasi Bank Indonesia



Gambar 2. 2 Struktur Organisasi Bank Indonesia

(Sumber bi.go.id)

Bagian ini membahas struktur organisasi Bank Indonesia (BI) yang relevan dengan sistem pembayaran, khususnya terkait dengan QRIS. Fokus utama akan diberikan pada departemen yang berperan penting dalam kebijakan dan pengawasan sistem pembayaran, serta bagaimana peran dan kewenangan Bank Indonesia terkait QRIS.

2.3.1 Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran

Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran (DKSP) merupakan salah satu unit utama dalam struktur organisasi Bank Indonesia yang berada di bawah koordinasi

Dewan Gubernur. Departemen ini berada dalam kelompok Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah, bersama dengan Departemen Penyelenggaraan Sistem Pembayaran dan Departemen Pengelolaan Uang.

Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran (DKSP) merupakan unit kerja di Bank Indonesia yang bertanggung jawab dalam perumusan kebijakan dan pengawasan sistem pembayaran. Departemen ini memainkan peran penting dalam menciptakan sistem pembayaran yang aman, efisien, handal, lancar, dan inklusif, guna mendukung stabilitas moneter, efisiensi perekonomian, dan stabilitas sistem keuangan.

Saat ini, DKSP dipimpin oleh Dicky Kartikoyono sebagai Asisten Gubernur – Kepala Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran. Beliau telah berkarier di Bank Indonesia sejak tahun 1995 dan menjabat sebagai Kepala DKSP sejak tahun 2023. Sebelumnya, beliau pernah menjabat sebagai Kepala Departemen Manajemen Strategis dan Tata Kelola (2022-2023) serta Kepala Perwakilan Bank Indonesia di London (2020-2022).

Sebagai unit kerja yang merumuskan kebijakan sistem pembayaran, DKSP berperan penting dalam pengembangan dan implementasi QRIS, di antaranya:

1. Menetapkan standar QRIS sebagai sistem pembayaran berbasis QR Code yang interoperabel dan dapat digunakan oleh berbagai penyedia jasa sistem pembayaran.
2. Mengarahkan strategi implementasi QRIS, termasuk mendorong penggunaan QRIS di sektor UMKM, ritel, dan layanan publik.
3. Melakukan pengawasan terhadap penyelenggara jasa sistem pembayaran (PJSP) yang menggunakan QRIS untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi BI.

4. Mendukung inklusi keuangan melalui perluasan akses QRIS ke daerah-daerah terpencil.

2.3.2 Peran dan Kewenangan Bank Indonesia dalam QRIS

Bank Indonesia (BI) memiliki peran utama dalam mengembangkan, mengatur, dan mengawasi implementasi QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard) di Indonesia. QRIS dikembangkan oleh Bank Indonesia dan Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI) untuk menciptakan standar nasional dalam pembayaran berbasis QR Code, guna memastikan interoperabilitas, efisiensi, dan keamanan transaksi digital.

Sebagai bank sentral, Bank Indonesia memiliki beberapa kewenangan utama dalam mengelola QRIS, antara lain:

- Menetapkan Standar Nasional QR Code untuk Pembayaran
 - BI menetapkan QRIS sebagai standar nasional untuk memastikan bahwa seluruh penyelenggara jasa sistem pembayaran (PJSP) dapat menggunakan satu QR Code yang sama.
 - Standar QRIS menggunakan sistem EMVCo, yang memungkinkan interkoneksi antar penyelenggara, antar instrumen, bahkan antar negara.
- Mewajibkan Implementasi QRIS oleh Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran (PJSP)
 - Sejak 1 Januari 2020, seluruh transaksi pembayaran berbasis QR Code di Indonesia harus menggunakan QRIS.
 - Penyelenggara QR Code harus mendapatkan persetujuan dari BI sebelum dapat beroperasi.

- Mengawasi dan Mengatur Kepatuhan PJSP terhadap QRIS
 - BI memonitor transaksi yang menggunakan QRIS dan memastikan bahwa penyelenggara pembayaran mengikuti regulasi yang berlaku.
 - Setiap penyelenggara QR Code harus memiliki sistem yang andal, mitigasi risiko yang kuat, serta perlindungan konsumen, termasuk penyelesaian sengketa dan penerapan Know Your Customer (KYC) untuk nasabah dan merchant.
- Meningkatkan Inklusi Keuangan Melalui QRIS
 - QRIS dirancang untuk mempercepat digitalisasi ekonomi, khususnya bagi UMKM dan sektor informal.
 - Dengan QRIS, merchant tidak perlu memiliki banyak QR Code dari berbagai penyedia layanan pembayaran, cukup satu QRIS yang bisa dipakai untuk semua aplikasi pembayaran.
 - QRIS diterapkan di berbagai sektor, termasuk ritel, transportasi, tempat ibadah, dan layanan publik.
- Melakukan Edukasi dan Sosialisasi QRIS
 - BI bekerja sama dengan PJSP dan ASPI dalam melakukan sosialisasi dan edukasi ke masyarakat, pelaku usaha, serta pemerintah daerah.
 - Tujuan utama adalah mendorong peralihan dari transaksi tunai ke non-tunai, sehingga meningkatkan efisiensi dan transparansi ekonomi.
- Mengembangkan QRIS untuk Pengguna Internasional
 - QRIS tidak hanya digunakan di dalam negeri, tetapi juga dapat digunakan oleh wisatawan mancanegara yang aplikasinya mendukung standar EMVCo.

- Ini merupakan langkah untuk mendukung sektor pariwisata dan ekonomi digital lintas negara.

Implementasi QRIS merupakan bagian dari Sistem Pembayaran Indonesia 2025 (SPI 2025) yang bertujuan untuk:

- Meningkatkan integrasi ekonomi-keuangan digital
- Mendukung inklusi keuangan bagi seluruh masyarakat Indonesia
- Memastikan keseimbangan antara inovasi dan perlindungan konsumen
- Menjamin kepentingan nasional dalam transaksi keuangan digital lintas negara

Sebagai regulator, Bank Indonesia terus mengembangkan, mengawasi, dan menyempurnakan kebijakan terkait QRIS agar dapat mendukung ekosistem pembayaran digital yang lebih efisien, aman, dan inklusif.

2.4 QRIS sebagai Inovasi Sistem Pembayaran

Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) merupakan inovasi dalam sistem pembayaran nasional yang dikembangkan oleh Bank Indonesia dan Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI). QRIS memungkinkan transaksi pembayaran berbasis QR Code menjadi lebih interoperabel, efisien, aman, dan inklusif, mendukung digitalisasi ekonomi serta inklusi keuangan di Indonesia.

2.4.1 Latar Belakang Pengembangan QRIS

Perkembangan teknologi finansial (financial technology/fintech) telah mendorong transformasi signifikan dalam sistem pembayaran di Indonesia. Sebelum diperkenalkannya Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS), pembayaran

berbasis QR Code mengalami berbagai tantangan, seperti fragmentasi sistem, kurangnya interoperabilitas, dan ketidakefisienan transaksi.

Sebelumnya, setiap Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran (PJSP) menggunakan sistem QR Code yang berbeda, sehingga merchant harus memiliki banyak QR Code dari berbagai layanan pembayaran (Bank Indonesia & ASPI, 2023). Situasi ini menciptakan kompleksitas bagi pelaku usaha, menghambat adopsi transaksi digital, serta memperlambat pengembangan ekonomi digital nasional.

Sebagai respons terhadap tantangan tersebut, Bank Indonesia (BI) bekerja sama dengan Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI) merancang QRIS, yang diperkenalkan pada 17 Agustus 2019 dan mulai diterapkan secara nasional pada 1 Januari 2020 (Bank Indonesia, 2019). QRIS bertujuan untuk menstandarisasi sistem pembayaran berbasis QR Code, menciptakan ekosistem pembayaran yang terintegrasi, efisien, aman, dan inklusif.

QRIS merupakan bagian dari visi Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia 2025 (SPI 2025), yang mengedepankan integrasi ekonomi-keuangan digital, efisiensi transaksi, dan perluasan akses terhadap layanan keuangan formal (Bank Indonesia, 2020). Dengan implementasi QRIS, sistem pembayaran diharapkan dapat mendukung pertumbuhan ekonomi digital, terutama bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta sektor informal.

2.4.2 Tujuan dan Manfaat QRIS

Pengembangan QRIS oleh Bank Indonesia memiliki tujuan utama sebagai berikut (Bank Indonesia & ASPI, 2023):

- Meningkatkan efisiensi sistem pembayaran melalui standarisasi QR Code yang dapat digunakan oleh seluruh PJSP tanpa perlu multiple QR Code.

- Mendorong inklusi keuangan dengan memberikan solusi pembayaran digital yang dapat diakses oleh UMKM, sektor informal, dan masyarakat unbanked.
- Mendukung kebijakan digitalisasi ekonomi dengan mempercepat adopsi transaksi non-tunai yang lebih aman, cepat, dan transparan.
- Memastikan keamanan transaksi dan perlindungan konsumen, dengan pengawasan ketat terhadap PJSP dan penerapan kebijakan Know Your Customer (KYC).
- Memperkuat integrasi keuangan digital dalam rangka meningkatkan daya saing ekonomi nasional serta mendukung konektivitas pembayaran lintas negara.

Implementasi QRIS memberikan dampak yang luas bagi berbagai pihak dalam ekosistem keuangan digital (Bank Indonesia, 2020), antara lain:

Bagi Konsumen

- Kemudahan transaksi, Satu QR Code dapat digunakan untuk semua layanan pembayaran digital.
- Keamanan transaksi, mengurangi risiko kehilangan uang tunai dan meminimalisir penyebaran uang palsu.
- Efisiensi waktu, mempercepat transaksi tanpa perlu membawa uang tunai atau kartu debit/kredit.

Bagi Merchant dan UMKM

- Interoperabilitas yang lebih luas, hanya perlu satu QRIS untuk menerima pembayaran dari berbagai layanan pembayaran digital.
- Meningkatkan pendapatan dengan memudahkan pelanggan dalam melakukan pembayaran digital.

- Meningkatkan transparansi keuangan, membantu akses ke layanan keuangan formal seperti kredit usaha.

Bagi Sistem Keuangan dan Ekonomi Nasional

- Meningkatkan efisiensi sistem pembayaran nasional dengan transaksi yang lebih cepat dan aman.
- Memperkuat regulasi dan pengawasan untuk mencegah aktivitas keuangan ilegal seperti pencucian uang dan pendanaan terorisme.
- Mendukung pertumbuhan ekonomi digital, khususnya dalam ekosistem e-commerce dan layanan berbasis digital.

Selain itu, QRIS juga mendukung transaksi lintas negara, di mana turis asing dapat menggunakan aplikasi pembayaran berbasis QR Code berstandar EMVCo, yang kompatibel dengan QRIS (Bank Indonesia & ASPI, 2023). Hal ini memperkuat pariwisata dan konektivitas sistem pembayaran di tingkat internasional.

2.4.3 Regulasi dan Implementasi QRIS

Sebagai regulator sistem pembayaran, Bank Indonesia mengatur implementasi QRIS melalui kebijakan dan regulasi yang memastikan standar ini diterapkan dengan baik. Beberapa regulasi utama terkait QRIS meliputi:

- Peraturan Anggota Dewan Gubernur (PADG) No. 21/16/PADG/2019, yang menetapkan QRIS sebagai standar nasional QR Code untuk pembayaran.
- Keputusan bahwa seluruh transaksi QR Code di Indonesia harus menggunakan QRIS sejak 1 Januari 2020.
- Ketentuan bagi PJSP yang ingin menerapkan QRIS untuk mendapatkan persetujuan dan lisensi dari Bank Indonesia.

- Penerapan kebijakan perlindungan konsumen, termasuk standar keamanan transaksi, mekanisme pengaduan, dan mitigasi risiko.

Implementasi QRIS dilakukan secara bertahap untuk memastikan kesiapan seluruh pemangku kepentingan.

1. Peluncuran Awal dan Pengadopsian oleh Merchant (2019-2020)

- Bank Indonesia dan ASPI melakukan sosialisasi dan edukasi kepada merchant dan pelaku usaha terkait manfaat serta cara penggunaan QRIS.
- PJSP diwajibkan untuk mengintegrasikan QRIS ke dalam layanan pembayaran digital mereka.

2. Ekspansi ke Berbagai Sektor (2021-sekarang)

- QRIS telah diadopsi dalam berbagai sektor, termasuk ritel, transportasi, layanan publik, dan e-commerce.
- Penerapan QRIS diperluas ke sektor keagamaan dan donasi, seperti pembayaran digital di tempat ibadah.
- QRIS mendukung Merchant Presented Mode (MPM) dan Customer Presented Mode (CPM) untuk meningkatkan fleksibilitas dalam transaksi digital.

3. Pengembangan QRIS Lintas Negara

- QRIS kini memungkinkan transaksi lintas negara, di mana wisatawan asing dapat menggunakan sistem pembayaran berbasis QR Code mereka di Indonesia.
- Inisiatif ini mendukung integrasi pembayaran digital ASEAN, terutama dengan Malaysia, Thailand, dan Singapura.

2.5 Karakteristik Responden

Karakteristik responden dalam penelitian ini digunakan untuk memperoleh informasi mengenai latar belakang serta kondisi responden yang menjadi sampel penelitian. Penelitian ini melibatkan 100 responden yang merupakan mahasiswa aktif program S1/D4 Universitas Diponegoro, dengan kriteria usia minimal 17 tahun dan merupakan pengguna layanan QRIS. Pemilihan responden dilakukan secara proporsional berdasarkan fakultas asal. Informasi yang dikumpulkan dalam penelitian ini mencakup jenis kelamin, usia, program studi, tingkat pendidikan, fakultas, serta frekuensi penggunaan QRIS dalam enam bulan terakhir.

2.5.1 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Klasifikasi responden berdasarkan jenis kelamin bertujuan untuk mengetahui proporsi laki-laki dan perempuan dalam penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas responden adalah perempuan, sebanyak 64 orang, sementara responden laki-laki berjumlah 36 orang. Pengelompokan ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 1 Pengelompokan Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Jumlah
Perempuan	64
Laki-laki	36
Total	100

Sumber: Data primer yang diolah, 2025

2.5.2 Karakteristik Responden Berdasarkan Usia

Pengelompokan responden berdasarkan usia bertujuan untuk memahami distribusi umur dalam penelitian ini. Tabel berikut menunjukkan bahwa mayoritas

responden berusia 21 tahun (60 orang), diikuti oleh kelompok usia 22 tahun (15 orang) dan 20 tahun (17 orang). Sementara itu, jumlah responden berusia 18, 19, 23, dan 24 tahun lebih sedikit.

Tabel 2. 2 Pengelompokkan Responden Berdasarkan Usia

Usia	Jumlah
18 - 19	4
20 - 21	77
22-24	19
Total	100

Sumber: Data primer yang diolah, 2025

Berdasarkan tabel di atas, mayoritas responden merupakan mahasiswa jenjang S1, D4, dan D3 yang berada dalam rentang usia 20–21 tahun, sesuai dengan umur umum mahasiswa semester atau menjelang semester akhir untuk jenjang tersebut. Sementara itu, jumlah responden usia lainnya mencerminkan tetap terwakilkannya mahasiswa dari tingkat yang lebih awal atau lebih akhir.

2.5.3 Karakteristik Responden Berdasarkan Semester

Pengelompokkan responden berdasarkan semester bertujuan untuk mengetahui distribusi mereka dalam jenjang studi S1, D4, dan D3. Tabel berikut menunjukkan bahwa mayoritas responden berada di semester 7-8 (64 orang), diikuti oleh semester 5-6 (25 orang). Sementara itu, hanya sedikit responden yang berasal dari semester awal (1-4) atau yang telah melewati semester 8.

Tabel 2. 3 Pengelompokkan Responden Berdasarkan Semester

Usia	Jumlah
Semester 1-2	2
Semester 3-4	6
Semester 5-6	25
Semester 7-8	64
> Semester 8	3
Total	100

Sumber: Data primer yang diolah, 2025

Dari tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden merupakan mahasiswa tingkat akhir di semester 7-8, yang umumnya sedang menyelesaikan tugas akhir atau skripsi. Sementara itu, mahasiswa di semester awal (1-4) memiliki proporsi yang lebih kecil, mencerminkan bahwa penelitian ini lebih banyak melibatkan mahasiswa yang sudah mendekati kelulusan.

2.5.4 Karakteristik Responden Berdasarkan Lama Penggunaan

Pengelompokkan responden berdasarkan lama penggunaan bertujuan untuk memahami durasi pengalaman mereka dalam menggunakan layanan yang diteliti.

Tabel 2. 4 Pengelompokkan Responden Berdasarkan Lama Penggunaan

Usia	Jumlah
< 1 tahun	2
1-3 tahun	67
> 3 tahun	31
Total	100

Sumber: Data primer yang diolah, 2025

Berdasarkan tabel di atas, mayoritas responden (67%) memiliki pengalaman penggunaan selama 1-3 tahun, menunjukkan bahwa mereka cukup familiar dengan

layanan yang diteliti. Sebanyak 31% responden telah menggunakan layanan ini lebih dari 3 tahun, yang menandakan tingkat pengalaman yang lebih tinggi. Sementara itu, hanya 2% responden yang baru menggunakan layanan ini kurang dari 1 tahun, sehingga proporsi mereka dalam penelitian ini relatif kecil.

2.5.5 Karakteristik Responden Berdasarkan Frekuensi Penggunaan

Pengelompokan responden berdasarkan frekuensi penggunaan bertujuan untuk memahami pola penggunaan QRIS dalam kehidupan sehari-hari.

Tabel 2. 5 Pengelompokan Responden Berdasarkan Frekuensi Penggunaan

Frekuensi Penggunaan	Jumlah
Setiap hari	71
Beberapa kali seminggu	26
Beberapa kali sebulan	3
Jarang	0
Total	100

Sumber: Data primer yang diolah, 2025

Berdasarkan tabel di atas, mayoritas responden (71%) menggunakan QRIS setiap hari, menunjukkan bahwa metode pembayaran ini telah menjadi bagian penting dalam transaksi mereka. Sebanyak 26% responden menggunakannya beberapa kali dalam seminggu, sementara hanya 3% yang menggunakannya beberapa kali dalam sebulan. Tidak ada responden yang jarang menggunakan QRIS, yang mengindikasikan bahwa seluruh sampel penelitian memiliki keterlibatan aktif dalam penggunaannya.

2.5.6 Hasil Tabulasi Silang Karakteristik Responden

Tabulasi silang merupakan metode analisis yang bertujuan untuk menjelaskan hubungan antar variabel dengan melihat keterkaitan antara dua variabel. Berikut merupakan hasil tabulasi silang yang dilakukan dalam penelitian ini:

1. Hubungan Antara Usia dan Lama Penggunaan QRIS

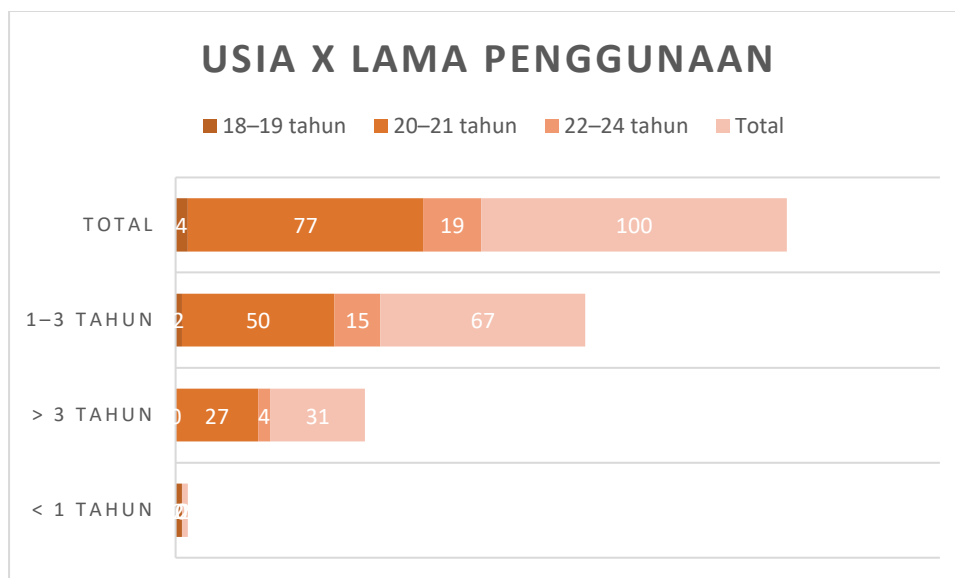
Tabel 2. 7 menyajikan hasil tabulasi silang antara usia responden dan lama penggunaan QRIS. Dari hasil tabulasi, dapat dilihat bahwa mayoritas responden telah menggunakan QRIS dalam rentang waktu 1-3 tahun, dengan jumlah terbesar berada pada kelompok usia 21 tahun, yaitu 38 responden. Selain itu, usia 20 dan 22 tahun juga memiliki jumlah pengguna yang cukup tinggi dalam kategori yang sama.

Tabel 2. 6 Hasil Tabulasi Silang Antara Usia dan Lama Penggunaan QRIS

Usia	< 1 tahun	> 3 tahun	1-3 tahun	Total
18 - 19	2	0	2	4
20 - 21	0	27	50	77
22 - 24	0	4	15	19
Total	2	31	67	100

Sumber: Data primer yang diolah, 2025

Untuk memberikan gambaran visual dari hasil tabulasi silang ini, Gambar 2. 3 menyajikan representasi dalam bentuk diagram batang bertumpuk. Diagram ini memperlihatkan proporsi penggunaan QRIS berdasarkan usia responden, yang menunjukkan bahwa mayoritas pengguna memiliki pengalaman menggunakan QRIS dalam waktu 1-3 tahun, dengan beberapa responden yang telah menggunakan lebih dari 3 tahun atau kurang dari 1 tahun.



Gambar 2. 3 Diagram Hubungan Usia dan Lama Penggunaan QRIS

2. Hubungan Antara Semester dan Frekuensi Penggunaan QRIS

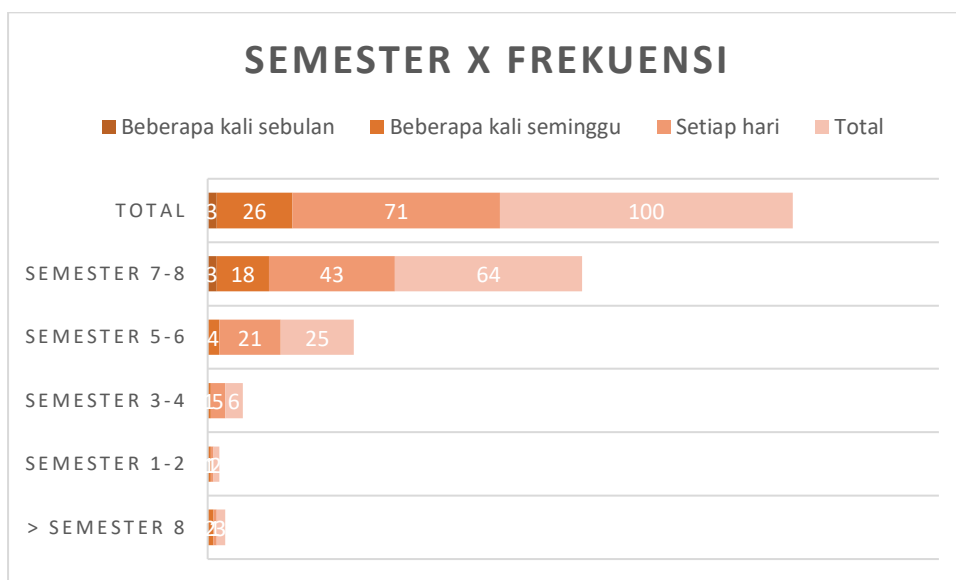
Tabel 2.8 berikutnya menampilkan hasil tabulasi silang antara semester perkuliahan responden dengan frekuensi penggunaan QRIS. Mahasiswa semester 7-8 merupakan kelompok dengan penggunaan QRIS tertinggi, dengan 43 responden menggunakan QRIS setiap hari, serta 18 responden menggunakan beberapa kali seminggu.

Tabel 2. 7 Hasil Tabulasi Silang Antara Semester dan Frekuensi Penggunaan QRIS

Semester	Beberapa kali sebulan	Beberapa kali seminggu	Setiap hari	Total
> Semester 8		2	1	3
Semester 1-2		1	1	2
Semester 3-4		1	5	6
Semester 5-6		4	21	25
Semester 7-8	3	18	43	64
Total	3	26	71	100

Sumber: Data primer yang diolah, 2025

Untuk memperjelas hubungan antara semester dan frekuensi penggunaan QRIS, Gambar 2.4 menyajikan visualisasi dalam bentuk diagram batang bertumpuk. Grafik ini menunjukkan bahwa frekuensi penggunaan QRIS meningkat seiring dengan tingkat semester, di mana mahasiswa yang berada di semester lebih tinggi cenderung lebih sering menggunakan QRIS dibandingkan mahasiswa semester awal.



Gambar 2. 4 Diagram Hubungan Semester dan Frekuensi Penggunaan QRIS